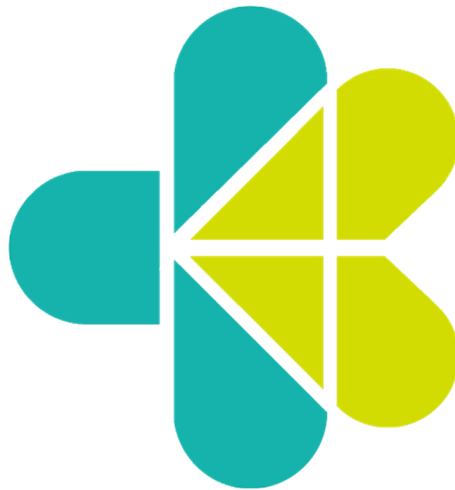


RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

TAHUN 2025-2029



BALAI LABKESMAS BATAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dapat diselesaikan. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangan situasi dan kondisi, kekuatan, hambatan, peluang dan tantangan, serta arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2025-2029, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan wilayah regional. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2025-2029 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya pelaksanaan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025-2029 ini. Semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, November 2025

Pt Kepala




Zulhirdan Siregar. S.T., M.H.

NIP. 197711152006041001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam periode tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari upaya mendukung arah Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dokumen RPJPN tersebut menggarisbawahi pentingnya mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh, merata dan responsif terhadap tantangan global di bidang laboratorium lingkungan dan klinis.

Selaras dengan hal tersebut, Visi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengarahkan pembangunan nasional menuju delapan misi utama (Asta Cita), salah satunya adalah mempercepat pembangunan kesehatan yang merata dan berbasis pencegahan, dengan fokus pada penguatan pelayanan primer, surveilans serta ketahanan kesehatan nasional.

Masalah kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain transisi epidemiologi, transisi demografi, krisis nasional multi dimensi, konflik antar kelompok masyarakat, serta desentralisasi dengan konsekuensi perubahan peran pusat dan daerah. Transisi epidemiologi di Indonesia menimbulkan beban ganda bagi pemerintah, karena di saat penyakit infeksi masih belum dapat sepenuhnya diatasi namun penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gangguan metabolis degenerative juga meningkat. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi dunia penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan untuk turut berperan dalam memberikan masukan IPTEK maupun kebijakan kesehatan agar dapat mengatasi permasalahan kesehatan tersebut.

Perkembangan permasalahan kesehatan dan penyakit-penyakit endemis lainnya, memerlukan berbagai upaya penanggulangan. Namun upaya penanggulangan tersebut belum memperlihatkan dampak yang optimal terhadap penurunan prevalensinya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah keadaan geografis Indonesia yang secara alami membentuk keragaman tipe ekologi dan kehidupan. Keberagaman ini berdampak pada munculnya variasi faktor epidemiologis yang meliputi perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, perbedaan sosial budaya dan perbedaan kerentanan penyakit.

Seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan pada kebijakan pemerintah salah satunya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dimana dengan terbitnya aturan tersebut maka resmi perubahan satker dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam. Kemudian telah terbit Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 berdasarkan PMK Nomor 12 Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Tahun 2025-2029.

B. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

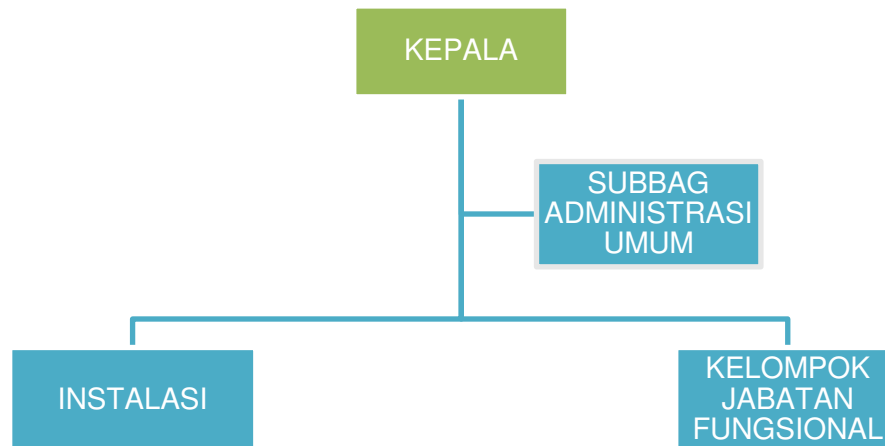
Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025-2029 adalah untuk:

- 1) Memberikan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Labkesmas Batam, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- 2) Memberikan informasi mengenai program dan evaluasi Labkesmas Batam.
- 3) Memberikan dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja program Labkesmas Batam.
- 4) Mengembangkan prioritas, arah dan panduan yang harus dilaksanakan Labkesmas Batam.

C. Kondisi Umum

1. Organisasi

Balai Labkesmas Batam merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Balai Labkesmas Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023, dimana pembentukannya dipusatkan di Batam dengan pertimbangan bahwa Batam adalah salah satu sentra pembangunan industri, perdagangan, pariwisata dan berbatasan laut dengan Singapore dan Malaysia. Oleh sebab itu keberadaan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan di Laboratorium, pengawasan atau surveilans penyakit.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Gambar 1 menunjukkan struktur organisasi yang ada pada Balai Labkesmas Batam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Balai Labkesmas Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Labkesmas Batam melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
- d. analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;
- g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
- h. pengelolaan biorepositori;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis;
- j. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
- k. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- l. pengelolaan data dan informasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

Balai Labkesmas Batam bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan. Adapun wilayah layanan

Balai Labkesmas Batam terdiri dari dari Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat yang terdiri dari 38 kabupaten/kota.

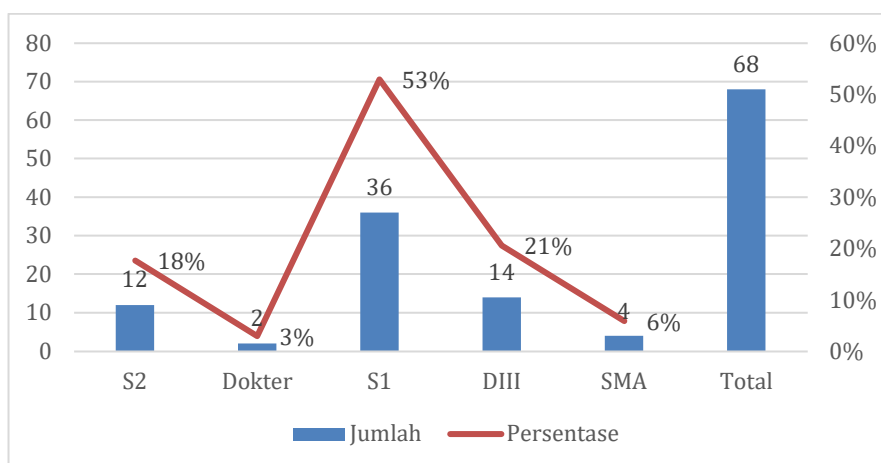
2. Sumber Daya Manusia

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Susunan organisasi UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Labkesmas Batam mengalami penambahan pegawai pada bulan Juni 2025 sebanyak 3 orang CPNS dan pada bulan Oktober sebanyak 14 orang PPPK yang sebelumnya merupakan PPNPN. Sehingga jumlah keseluruhan SDM baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana pada tahun 2025 adalah sebanyak 68 orang pegawai. Adapun kekuatan SDM di lingkungan Balai Labkesmas Batam dapat digambarkan dengan gambar berikut ini.

Grafik Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



Grafik menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berpendidikan S1 dengan jumlah 36 orang (53%), disusul D-III sebanyak 14 orang (21%) dan S2 sebanyak 12 orang (18%). Sementara itu, pegawai dengan pendidikan SMA berjumlah 4 orang (6%) dan Dokter hanya 2 orang (3%). Sebagai satker Laboratorium Kesehatan Masyarakat, kondisi ini menunjukkan bahwa institusi masih sangat membutuhkan penambahan personel yang sesuai dengan kompetensi teknis dan keilmuan laboratorium, khususnya tenaga medis dan tenaga analis profesional, guna mendukung pelaksanaan pelayanan laboratorium, penguatan kapasitas surveilans kesehatan, serta peningkatan mutu dan cakupan layanan secara optimal.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai Labkesmas Batam menjadi penunjang keberhasilan pencapaian target. Luas gedung kantor sekaligus laboratorium yang dimiliki oleh Balai Labkesmas Batam sebesar 3600 m². Luasan ini mencakup berbagai sarana seperti ruang untuk administratif, ruang kerja tim kerja, instalasi laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Balai Labkesmas Batam terus berusaha melengkapi fasilitas yang memadai untuk memastikan optimalnya layanan kepada masyarakat terutama menjalankan tugasnya sebagai labkesmas tier 4. Berikut fasilitas yang dimiliki oleh Balai Labkesmas Batam:

- a. Ruang administratif
- b. Ruang Pertemuan/Rapat
- c. Ruang instalasi laboratorium yang terdiri dari:
 1. Instalasi mikrobiologi dan biomolekuler
 2. Instalasi patologi klinik dan imunologi
 3. Instalasi kesehatan lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit
 4. Instalasi K3 dan pengelolaan limbah dan biorepository
 5. Instalasi sarana prasarana, kalibrasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna
 6. Instalasi sampling, media reagensia, dan sterilisasi
- d. Ruang Pelayanan
- e. Kendaraan operasional
- f. Peralatan Laboratorium dan perkantoran.

D. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan tugas fungsi dan kedudukan Balai Labkesmas Batam yang di atur didalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2023, maka secara teknis Balai Labkesmas Batam memiliki potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan khususnya di wilayah layanan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah layanan diperlukan ketajaman identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi Balai Labkesmas Batam. Berikut ini gambaran identifikasi melalui analisis SWOT.

Kekuatan (*Strengths*)

1. Laboratorium yang telah terkreditasi

Labkesmas Batam telah memiliki pengakuan mutu dan kompetensi laboratorium melalui status akreditasi dan registrasi resmi. Labkesmas Batam telah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi IEC SNI ISO

17025:2017, serta teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan. Status tersebut menjadi landasan kuat dalam menjamin keandalan hasil pengujian dan kalibrasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat peran Labkesmas Batam sebagai rujukan layanan laboratorium dan pendukung surveilans kesehatan berbasis laboratorium di wilayah binaan.

2. Peran Labkesmas sebagai laboratorium rujukan dan pembina wilayah

Labkesmas Batam berperan sebagai laboratorium rujukan teknis dan pembina wilayah dalam penyelenggaraan layanan dan tata kelola laboratorium kesehatan untuk regional 2 yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Peran tersebut tercermin dari pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dan berjenjang. Peningkatan intensitas pembinaan dan koordinasi ini menunjukkan komitmen Labkesmas Batam dalam meningkatkan kapasitas, keseragaman standar, dan mutu layanan laboratorium di wilayah binaan.

3. Peralatan laboratorium yang terus ditingkatkan.

Infrastruktur Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Batam telah memadai untuk mendukung penyelenggaraan layanan laboratorium kesehatan masyarakat secara optimal. Ketersediaan gedung, peralatan laboratorium, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya telah memenuhi kebutuhan operasional dan standar layanan yang ditetapkan, sehingga mampu menunjang peningkatan kapasitas pemeriksaan, ketepatan waktu layanan, serta mutu hasil pengujian. Kondisi infrastruktur yang memadai ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran Labkesmas Batam sebagai penyedia layanan laboratorium, pendukung surveilans berbasis laboratorium, dan rujukan teknis di wilayah binaan.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Kuantitas SDM belum memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2025, Balai Labkesmas Batam memiliki SDM sebanyak 68 ASN yang terdiri dari 50 PNS, 3 CPNS dan 15 PPPK. Jumlah tersebut perlu ditinjau kembali melalui perhitungan kebutuhan pegawai, agar dapat dipastikan apakah sudah sesuai dengan beban kerja yang ada atau masih memerlukan penyesuaian.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan teknis, khususnya pada tenaga laboratorium dan jabatan administrasi, yang secara langsung berdampak terhadap kelancaran dan kualitas layanan laboratorium kesehatan masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar perlunya dilakukan

redistribusi pegawai internal dan pengusulan formasi baru untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

2. Belum semua alat dan metode pemeriksaan laboratorium tersedia.

Ketersediaan alat dan metode pemeriksaan laboratorium di Labkesmas Batam belum sepenuhnya lengkap untuk mendukung seluruh kebutuhan layanan dan pengembangan pemeriksaan. Kondisi ini menyebabkan beberapa jenis pemeriksaan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal atau harus menyesuaikan dengan keterbatasan sarana yang ada, sehingga berpotensi membatasi perluasan cakupan layanan dan kecepatan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Kelemahan ini menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kapasitas dan mutu layanan laboratorium secara berkelanjutan.

3. Ketergantungan pada kebijakan anggaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan Labkesmas Batam masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan dan kebijakan pengelolaan anggaran. Dinamika anggaran, termasuk kebijakan pemblokiran, refocusing, maupun keterlambatan pencairan, berpotensi memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan, pemenuhan sarana pendukung, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi kelemahan yang perlu diantisipasi melalui penajaman prioritas, peningkatan efisiensi, dan penguatan perencanaan agar capaian kinerja tetap terjaga.

Peluang (Opportunities)

1. Kontribusi dan peran Balai Labkesmas Batam dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah layanan semakin dirasakan masyarakat;
2. Belum tersedianya Labkesda di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Masyarakat sangat membutuhkan Teknologi Tepat Guna dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan.
4. Integrasi kegiatan antara Balai Labkesmas Batam telah terjalin dengan baik;
5. Ada berbagai variasi instrumen yang menjadi alternatif untuk proses evaluasi pelaksanaan rekomendasi kegiatan; dan
6. Kebutuhan pengujian laboratorium yang datang dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat semakin meningkat.

Ancaman (Threats)

1. Kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan.

Konsekuensi dari wilayah kepulauan adalah wilayahnya cenderung sulit dijangkau dan biaya transportasi cenderung mahal. Sementara biaya sewa yang diakomodir di dalam SBM Kementerian Keuangan terkadang lebih rendah dari *real cost*-nya. Wilayah kepulauan juga sangat dipengaruhi musim, jika sedang musim gelombang laut kuat, maka alat transportasi air tidak beroperasi sehingga terkadang kegiatan yang telah dijadwalkan harus diundur.

2. Data kasus terkait penyakit kurang memadai.

Harapannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Labkesmas dapat bermanfaat di wilayah layanan. Akan tetapi dukungan data dari daerah kurang memadai sehingga penentuan lokasi kegiatan terkadang belum sesuai. Kurangnya data kasus juga dirasa kurang memberikan referensi terkait jenis kegiatan yang dibutuhkan oleh wilayah layanan.

3. Tata kelola organisasi yang masih belum optimal

Saat ini Balai Labkesmas Batam sedang mengupayakan pencapaian WBK satker tingkat Kementerian Kesehatan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian ini adalah kurangnya komitmen bersama untuk menuju WBK. Sehingga perlu penguatan terutama pada program pengawasan dan pelayanan publik.

4. Keterbatasan kemampuan stakeholder untuk melaksanakan rekomendasi, baik kemampuan dalam penadanaan, waktu, maupun SDM yang melaksanakan.

5. Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan berdampak pada perubahan kebijakan internal satker.

BAB II

VISI MISI , TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025 - 2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (*Asta Cita*) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “*mempertuakan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas*”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Menguatkan tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visinya yakni:

1. Meningkatkan surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium, melalui kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan kegiatan dan jejaring kerja kemitraan lintas program / lintas sektor dengan instansi pemerintah dan swasta dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB /Wabah / Bencana.
 - Meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan respon cepat serta fasilitasi penanggulangan KLB / Wabah / Bencana.
 - Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga terhindar dari pencemaran, risiko penyakit serta KLB / Wabah.
 - Pengumpulan data dan pengamatan faktor risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya KLB / Wabah / Bencana.
 - Pengambilan spesimen dan pemeriksaan di laboratorium dengan baik dan benar sesuai dengan SOP dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 - Meningkatkan kemampuan pengelolaan logistik bantuan untuk Buffer Stock KLB / Wabah / Bencana dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan.
2. Pengembangan model dan teknologi tepat guna, melalui kegiatan sebagai berikut:
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis yang ada dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
 - Peningkatan penyediaan bahan, media dan reagensia serta bahan penunjang untuk
 - Pelaksanaan kegiatan laboratorium dan penerapan teknologi tepat guna.
3. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan kegiatan, melalui kegiatan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP/aturan/mechanisme yang berlaku.
 - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kegiatan.
 - Peningkatan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui kegiatan sebagai berikut :
- Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi.
 - Peningkatan profesionalisme melalui pelatihan baik luring maupun daring.
 - Peningkatan dan pemberian kesempatan mengikuti pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar.

2.2 Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 7 tujuan Kementerian Kesehatan untuk 5 tahun kedepan yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat dan terjangkau
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Kesehatan Masyarakat, maka Balai Labkesmas Batam telah menetapkan tujuan strategis yakni "**Terwujudnya Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang handal dan sesuai standar**".

2.3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029 (terlampir). Untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan maka ditetapkanlah sasaran strategis Balai Labkesmas Batam yakni "**Meningkatnya Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang handal dan sesuai standar**". Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis yakni terwujudnya laboratorium kesehatan masyarakat yang handal dan sesuai standar.

2.4. Indikator Kinerja

Indikator Kerja Balai Labkesmas Batam tahun 2025-2029 :

1. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel
2. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan
3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
4. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional
5. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
6. Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan
7. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori
8. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas
9. Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas

10. Indeks Kualitas SDM Labkesmas
11. Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas
12. Persentase Realisasi Anggaran

2.5. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yakni Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tetap berkomitmen terhadap kebijakan Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sehingga kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RPJMN tetap akan dilaksanakan secara berkala.

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yakni Penguatan surveilans berbasis laboratorium, pemanfaatan rekomendasi dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor, penguatan jejaring kemitraan serta penggunaan teknologi informasi.

Arah kebijakan Balai Labkesmas Batam tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

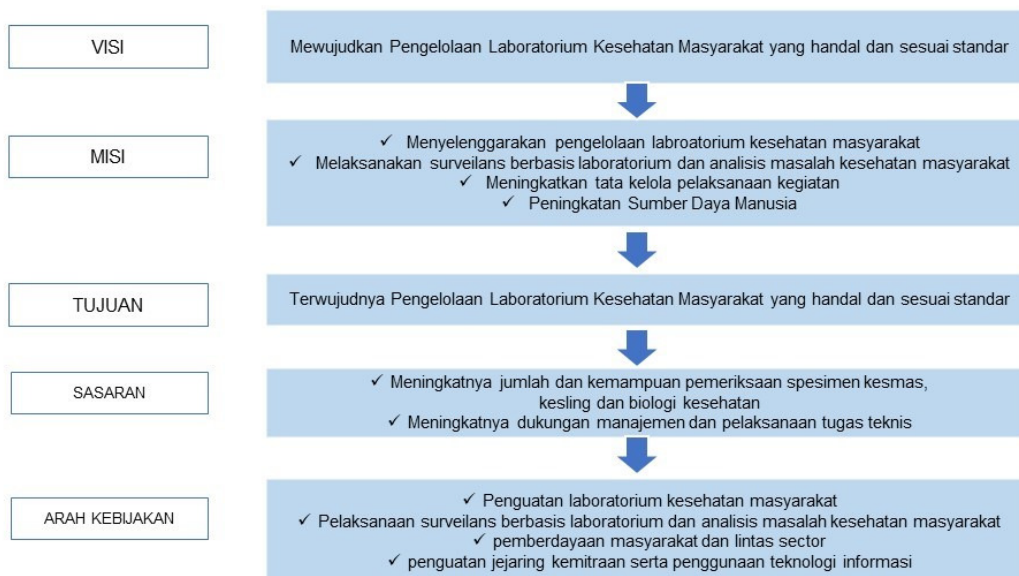
1. Peningkatan dan pengembangan surveilans dan respon KLB di wilayah layanan.
2. Peningkatan pemanfaatan hasil surveilans dan teknologi tepat guna di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Penguatan dan Peningkatan komunikasi dan advokasi kepada masyarakat, lintas sektor/program.
4. Peningkatan jalinan kerjasama bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
5. Pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. KERANGKA LOGIS

Penentuan Indikator Kinerja Balai Labkesmas Batam merupakan turunan (*cascade*) dari penjabaran sasaran program (*outcome*) unit eselon I Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. *Cascading* indikator kinerja kegiatan Balai Labkesmas Batam dapat dilihat pada gambar berikut.



Kementerian Kesehatan mengamanatkan dua program kepada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Program pertama yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sedangkan program kedua adalah Program Dukungan Manajemen sebagai program generik. Sebagai UPT, Balai Labkesmas Batam dimandatkan untuk melaksanakan kedua program tersebut agar selaras dengan program unit di atasnya.

Dalam program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang memiliki dengan kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Dengan sasaran yaitu meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan. Salah satu sasaran yang selaras dengan tugas dan fungsi Balai Labkesmas Batam adalah Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium. Selain itu, untuk dapat mencapai sasaran tersebut didukung adanya Program dukungan manajemen dengan sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian dukungan manajemen.

Cascading Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Indikator Kinerja

Balai Labkesmas Batam

SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BALAI LABKESMAS BATAM
<p>Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>Sasaran :</p> <p>a) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Labkesmas</p> <p>Indikator Kinerja Program (IKP):</p> <p>1) Persentase Labkesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya</p> <p>2) Persentase Labkesmas yang terakreditasi</p>	<p>Kegiatan: Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat</p> <p>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas</p> <p>Indikator sasaran : Persentase Labkesmas dengan tata kelola sesuai standar</p>	<p>Indikator Kinerja Balai Labkesmas Batam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 16.1.1.a. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel 2. 16.1.1.b. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan 3. 16.1.1.c. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas 4. 16.1.1.d. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional 5. 6.1.e. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 6. 14.4.f. Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan 7. 14.4.g. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository
<p>Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan</p> <p>Indikator :</p> <p>IKM 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes</p> <p>IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan</p> <p>IKM 33.3 Indeks Kualitas SDM Kementerian Kesehatan</p> <p>IKM 33.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Kementerian Kesehatan</p> <p>IKM 33.5 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)</p> <p>IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan</p>	<p>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2. Persentase kinerja RKAKL pada Lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 	<p>Indikator Kinerja Balai Labkesmas Batam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKM 33.1.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas 2. IKM 33.2.3 Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas 3. IKM 33.3.3 Indeks Kualitas SDM Labkesmas 4. IKM 33.5.3 Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas 5. IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran

B. RENCANA KEGIATAN

Target Kinerja tahun 2025 – 2029 untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Target Kinerja tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan I : Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas						
1	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel (spesimen klinis dan/atau sampel)	10.000	12.000	14.000	15.000	16.000
2	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan (rekomendasi)	16	17	18	19	20
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas (%)	100	100	100	100	100
4	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional (MoU/PKS/ Laporan)	10	12	14	16	18
Sasaran Kegiatan II : Meningkatkan kualitas fasilitas dan mutu labkesmas						
5	Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME) (Kali)	10	11	12	13	14
6	Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan (Labkesmas)	85	90	95	100	105
7	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository (%)	100	100	100	100	100
Sasaran Kegiatan III : Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas (Nilai)	77	80	82	85	87
9	Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas (Nilai)	92,35	92,55	92,75	92,95	93,15
10	Indeks Kualitas SDM Labkesmas (Indeks)	81	82	83	84	85
11	Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas (Nilai)	3,95	3,96	3,97	3,98	4,00
12	Persentase Realisasi Anggaran (%)	96	96,5	97	97,5	98

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka Balai Labkesmas Batam Batam terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor: HK.02.02/B/155/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebanyak 6 instalasi dan 3 tim kerja, yaitu:

1. Instalasi Sampling, Media, Reagensia, dan sterilisasi;
2. Instalasi Patologi Klinik dan Immunologi;
3. Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler;
4. Instalasi Kesehatan Lingkungan, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
5. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan limbah dan biorespositori;
6. Instalasi Sarana dan Prasarana, Kalibrasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
7. Tim Kerja Program Layanan;
8. Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan; dan
9. Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sedangkan kelompok jabatan fungsional yang ada di Balai Labkesmas Batam terdiri dari:

1. Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan;
2. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
3. Jabatan Fungsional Sanitarian;
4. Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan.
5. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
6. Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
7. Jabatan Pranata Keuangan APBN
8. Jabatan Fungsional Perencana
9. Jabatan Analis Kepegawaian
10. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
11. Jabatan Fungsional Arsiparis
12. Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat

D. KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan, pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dimana dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek

perlindungan yang kuat. Adapun peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan KLB Penyakit Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
9. Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
11. Permenkes RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/155/2024 tentang Pedoman Instalasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; 24 25
13. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi;
14. Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI ISO 15189:2022 Persyaratan mutu dan kompetensi Laboratorium Medik.
15. Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI ISO 17043:2023 Penilaian Kesesuaian — Persyaratan umum kompetensi bagi penyelenggara uji profesiensi

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan komunitas dan sasaran strategis Balai Labkesmas Batam, beberapa kebutuhan regulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan harus mengikuti 9 peta proses bisnis antara lain:

Proses 1. Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan umum

- Proses 2. Penyelenggaraan Sistem Kepatuhan Internal
- Proses 3. Penyusunan prosedur teknis Pengelolaan Labkesmas
- Proses 4. Pembinaan Pengelolaan Labkesmas dan Pembinaan Wilayah
- Proses 5. Pelaksanaan Pengelolaan Labkesmas
- Proses 6. Pengawasan dan Penyelidikan
- Proses 7. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Labkesmas
- Proses 8. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Labkesmas
- Proses 9. Pengembangan Labkesmas

E. KERANGKA PENDANAAN

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Tabel Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas						
1	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	2.954	5.100	5.241	5.896	5.551
2	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	369	253	326	398	471
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	2	250	270	275	282
4	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	1	75	80	85	90
Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya kualitas fasilitas dan mutu labkesmas						
5	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	322	55	60	65	70
6	Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	147	330	350	380	400
7	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	355	355	355	355	355
Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
8	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	0			3.000	3.500
9	Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	172	14.101	14.931	15.760	16.258
10	Indeks Kualitas SDM Labkesmas	220	33	35	37	39
11	Nilai maturitas manajemen risiko Labkesmas	67	352	422	493	563
12	Persentase Realisasi Anggaran	12.036	12.036	12.036	12.036	12.036
	Total	16.647	18.580	19.240	20.267	21.239

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana aksi kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pemantauan rencana aksi dilakukan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Pemantauan dengan Emonev SMART DJA

SMART DJA adalah sebuah aplikasi monitoring pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap satker wajib mengisi capaian kinerjanya pada aplikasi ini. Pemantauan dilakukan setiap bulan oleh Staf Penyusun Program Anggaran Pelaporan/Perencana.

2. Pemantauan dengan Emonev Bappenas

Pemantauan dilakukan terkait pengukuran realisasi anggaran dan capaian/realisasi fisik (komponendan Rincian Output), status pelaksanaan dan progres kegiatan dalam DIPA sesuai tahun anggaran berjalan. Pemantauan Emonev Bappenas dilakukan melalui aplikasi e-Monev yang diinput setiap bulan.

3. Rapat koodinasi bulanan

Kegiatan ini dilakukan setiap bulan dengan metode pemaparan hasil kegiatan dan rencana kegiatan oleh masing-masing bagian/timkerja/instalasi yang ada di Balai Labkesmas Batam. Rapat dihadiri oleh seluruh pimpinan dan pegawai baik PNS maupun PPNPN. Hasil kegiatan ini dirangkum dalam sebuah laporan bulanan dan laporan tindak lanjut.

B. EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Adapun ruang lingkup evaluasi yang dilakukan adalah capaian target kegiatan, capaian target anggaran, dan capaian IKK untuk masing-masing pelaksana IKK. Tindaklanjut atas hasil evaluasi akandipantau pada rapat monev bulan selanjutnya sebagai bukti telah dilakukan perbaikan yang sesuai dengan hasil evaluasi.

C. PENGENDALIAN

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Adapun bentuk pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala.
2. Membandingkan kinerja secara parsial dengan target kinerja.
3. Melakukan tindakan koreksi terhadap permasalahan yang muncul.
4. Melakukan identifikasi dan manajemen risiko

Peran kepala satker dalam pengendalian yaitu berada pada semua bentuk pengendalian karena kepala satker yang memiliki dan mengendalikan risiko.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Labkesmas Batam Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Balai Labkesmas Batam. Penyusunan dokumen ini melibatkan semua tim kerja dan instalasi di Balai Labkesmas Batam. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Labkesmas Batam, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam program Kesehatan Masyarakat khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.